

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016-2021 DI DESA DAYAKAN  
KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2019  
(Studi Kasus Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai)

Oleh:

Moh. Gufron Rosyid Ridlo

***Abstract***

*The results showed an evaluation of the implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) using William Dunn with six variables, namely effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness and accuracy, namely: BPNT implementation starts from the stages of registration or account opening, education and socialization, distribution, and purchase of goods at e-warong and Bank BNI 46. Achievement of BPNT implementation results, seen from BPNT objectives, is still not optimal for all BPNT KPM. The assessment of the implementation of BPNT in Dayakan Village, Badegan District, Ponorogo Regency based on William Dunn's theory is the effectiveness of achieving BPNT goals, efficiency of distribution time and the number of e-warongs or BNI 46 agents who facilitate the purchase of goods, criteria for the leveling of BPNT program recipients, and responsiveness criteria for problem handling not good. Meanwhile, the criteria for the adequacy of the results / benefits of BPNT that are felt by the poor to meet food needs and the criteria for BPNT's accuracy in answering the problems of poverty and hunger faced by the poor are quite good.*

***Keywords: effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness and responsive***

---

**Pendahuluan**

**Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan BPNT akan memanfaatkan sistem perbankan, dimana bantuan akan disalurkan kedalam kupon elektronik (e-voucher) dalam bentuk kartu yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi untuk membeli kebutuhan pangan dengan pilihan yang lebih beragam serta sesuai dengan kualitas

yang diinginkan. Dengan mempertimbangkan antara lain kesiapan infrastruktur pembayaran dan jaringan telekomunikasi, kesiapan pasokan bahan pangan dan usaha eceran, serta dukungan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan Tujuan Nasional tersebut di Kabupaten Ponorogo mempunyai pegangan kebijakan Peraturan Daerah

Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 yang berfokus mencapai SDGs dengan menghapus segala bentuk kemiskinan di Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini mengambil fokus Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 Di Desa Dayakan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 (Studi Kasus Pelaksanaan Program BPNT).

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 Di Desa Dayakan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 terkait Pelaksanaan Program BPNT?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 Di Desa Dayakan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 terkait Pelaksanaan Program BPNT.

### **Kerangka Berpikir**

Evaluasi Pelaksanaan BPNT dalam penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Pelaksanaan dengan model Evaluasi Pelaksanaan menurut Dunn. Hal ini didasari karena dalam teori tersebut dijelaskan bahwa Evaluasi Pelaksanaan kebijakan berkenaan dengan kinerja dari kebijakan khususnya pada implementasi kebijakan publik. Selain itu alasan lainnya adalah karena BPNT merupakan kebijakan yang masih dalam proses pelaksanaan. Dimensi Evaluasi Pelaksanaan yang digunakan adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2009:130), penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut para informan, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis pula apa yang melatarbelakangi mereka berperilaku (berfikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti) dan diverifikasi (dikonsultasikan kepada informan atau teman sejawat).

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka hasil penelitian terkait dengan evaluasi pelaksanaan BPNT dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan

berkelanjutan (SDGS) di Desa Dayakan Kecamatan Badegan yang dianalisis menggunakan teori teori model Evaluasi Pelaksanaan kebijakan William Dunn dengan indikator Evaluasi Pelaksanaan dengan enam variabel yaitu Efektivitas; Efisiensi; Kecukupan; Perataan; Responsivitas; dan Ketepatan adalah sebagai berikut.

### **1. Efektifitas**

Efektivitas penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara nontunai, dengan menggunakan sistem perbankan. Berdasarkan panduan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia, BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-warung KUBE PKH/pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank Himbara.

Pelaksanaan penyaluran BPNT mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyaluran BPNT. Pasal 3 Permensos tersebut dijelaskan bahwa, BPNT disalurkan di lokasi dengan kriteria tersambung dengan jaringan internet; dan terdapat e-warung. Selanjutnya dalam pelaksanaan BPNT pasal 33 terdapat tenaga pelaksana BPNT yang terdiri atas koordinator wilayah; koordinator daerah

kabupaten/Kecamatan; dan pendamping sosial bantuan sosial pangan.

Adanya program bantuan pangan non tunai diharapkan mampu mengurangi pengeluaran KPM karena dengan mekanisme elektronik warung yang dimana KPM hanya dapat mencairkan bantuan dengan menukarkan barang sesuai kebutuhan di e-warung. Itu tentu saja efektif dalam mengurangi beban kebutuhan KPM belum lagi bantuan tersebut hanya dapat ditukarkan dalam waktu satu kali sebulan.

Sesuai yang disampaikan Bapak Putut selaku pendamping Sosial PKH Desa Dayakan, bahwa: Bantuan pangan non tunai sudah sangat baik terutama dalam mengurangi beban KPM itu terbukti karena kebutuhan KPM sudah diatur dalam BPNT sehingga KPM dituntut mampu mengatur pemenuhan kebutuhan dengan baik sehingga bantuan itu dapat cukup dalam sebulan". Penjelasan Putut (pendamping Sosial PKH Desa Dayakan) menggambarkan bahwa aspek perencanaan sudah sangat baik karena mampu mengurangi beban pengeluaran KPM setiap bulannya dan menjamin kebutuhan KPM setiap bulannya.

Sesuai tujuan BPNT menurut panduan umum BPNT 2017 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.

- b. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM.
- c. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM.
- d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- e. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

## 2. Efisiensi

Penyaluran Bantuan program bantuan pangan nontunai (BPNT) telah terealisasi dengan baik. Namun, sejauh ini pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) belum dapat diukur dikarenakan belum ada catatan penelitian menyatakan program bantuan pangan non tunai (BPNT) telah terlaksana sesuai tujuan yang diharapkan di Desa Dayakan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) dapat ditinjau dari tindakan lapangan melaluipihak-pihak terkait.

Penjelasan Bapak Saroni, M.Pd selaku Kepala Desa Dayakan, bahwa: Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah sangat baik dari segi pelaksanaan, apalagi di Desa Dayakan ini masih banyak warga yang berhak mendapatkan bantuan, meskipun tergolong kota namun masih banyak warga yang belum sejahtera. Dan BPNT sudah

tepat sasaran bagi sebagian orang dan perlu ditinjau kembali atau survei kembali penerima manfaat jangan sampai masyarakat yang telah sejahtera masih menerima bantuan tidak manusiawi”

Secara empiris menggambarkan keberadaan dan kedudukan program pangan non tunai (BPNT) sebagai langkah strategis memenuhi taraf kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Akan tetapi, perlu di garis bawahi bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai telah memberikan kebermanfaatan bagi sebahagian orang dan dibalik itu bisa pula memberikan kemudahan bagi sebagian orang. Penekanan bagi program BPNT seyogyanya mengupdate data baru bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar sekiranya tepat sasaran.

Sasaran BPNT adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, yang selanjutnya disebut DT.-PPFM yang merupakan hasil pemutakhiran basis data terpadu tahun 2015. Data tersebut dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Pokja Data) yang dibentuk dari SK Mensos. Jumlah KPM BPNT di setiap provinsi disebut Pagu Penerima BPNT Provinsi dan Pagu Penerima BPNT Kabupaten di lingkup kabupaten. Pagu KPM menjadi titik fokus ketetapan dari sasaran BPNT dan harus ada tindakan pembenahan.

Menurut Abidin (2016:212) mengatakan Evaluasi Pelaksanaan

akhir ini diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan secara menyeluruh dari suatu kebijakan, baik yang berasal dari kelemahan strategi kebijakan maupun karena kelemahan dalam pelaksanaan. Tujuan Evaluasi Pelaksanaan akhir adalah untuk membangun dan menyempurnakan kebijakan sehingga fokusnya tidak hanya pada suatu tahap dalam proses kebijakan, tetapi pada keseluruhan proses. Karena itu, objek yang diidentifikasi bukan sekedar kegagalan, melainkan juga keberhasilan. Kegagalan menjadi sasaran untuk diperbaiki, sementara keberhasilan menjadi contoh untuk dikembangkan. Informasi yang dihasilkan dari Evaluasi Pelaksanaan merupakan nilai (*values*) yang antara lain berkenaan dengan:

- a. Efisiensi, yakni perbandingan antara hasil dengan biaya (hasil/biaya)
- b. Keuntungan, yaitu selisih antara hasil dengan biaya atau (hasil-biaya)
- c. Efektif, yakni penilaian pada hasil, tanpa memperhitungkan biaya.
- d. Keadilan, yakni keseimbangan (proporsional) dalam pembagian hasil (manfaat) dan/atau biaya (pengorbanan)
- e. *Destriments*, indikator negatif di bidang sosial seperti criminal
- f. Manfaat tambahan

### 3. Kecukupan

Program BPNT di Desa Dayakan Kecamatan Badegan telah memberikan kebermanfaatn bagi penerima manfaat BPNT dengan kondisi ekonomi 25% terendah di daerah tersebut. Sedikit demi sedikit, tujuan program BPNT telah dirasakan oleh para KPM. Ibu Suliyem, sebagai warga masyarakat KPM BPNT Desa Dayakan, mengatakan: Bantuan ini sangat bermanfaat karena sudah mengurangi biaya untuk membeli makanan, meskipun belum cukup dalam sebulan. Bantuan yang diterima biasanya habis dalam dua minggu dan bantuan yang didapatkan berupa beras sebanyak 10 kg dan telur sebanyak 5 butir”. Hal serupa disampaikan dan dialami oleh Ibu Katirah sebagai warga masyarakat KPM BPNT Desa Dayakan, mengatakan: Alhamdulillah saya bersyukur menerima bantuan, bisa kita lihat kondisi rumah saya dengan banyak anak-anak saya. Memang berhak menerima bantuan dan telah dilaksanakan dengan baik karena memberikan saya rasa aman untuk membeli beras tapi bantuan itu belum cukup sebulan dengan keluarga saya banyak”

Selanjutnya Ibu Kadinem (masyarakat KPM BPNT Desa Dayakan) juga menyampaikan manfaat program BPNT yang dirasakan olehnya sebagai KPM, mengatakan: Sangat bermanfaat walau tidak memenuhi kebutuhan keluarga dan anak secara menyeluruh tapi membantu mengurangi beban dari keluarga kami. Kalau makan sehari-hari

kadang cukup kadang tidak dengan beras yang saya tukarkan semua, jadi lauknya cari sendiri.

Penerima manfaat dari program Bantuan Pangan Non Tunai, yang disebut KPM. Sesuai dengan pedoman dan aturan pelaksanaan bantuan sasaran bantuan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi 25 % terendah di daerah pelaksanaan. Dari hasil temuan di lapangan, BPNT di Desa Dayakan masih memberikan bantuan bagi orang yang berkecukupan. Ketidaktepatan sasaran bantuan disampaikan langsung oleh Koordinator Pendamping sosial PKH kecamatan Badegan yaitu Bapak Zainal Arifin, yang mengatakan bahwa: “Sebagian penerima BPNT sudah tepat tapi memang ada beberapa KPM yang sejahtera namun masih menerima bantuan itu.

Pemerintah dalam melaksanakan program ini sesuai dengan tujuannya adalah untuk mengatasi kemiskinan dalam hal kecukupan pangan bagi masyarakat miskin. Namun, realitanya masih terdapat gejala masalah dalam pelaksanaan program BPNT di masyarakat yang menandakan bahwa belum maksimalnya program ini terutama dalam penyaluran bantuan yang belum tersalur secara serentak bagi semua KPM. Padahal program ini dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan kekurangan pangan bagi masyarakat perlu dilaksanakan dengan kesiapan pendukung baik itu dari segi data, implementor maupun dari fasilitas pendukung lainnya agar masyarakat mendapatkan manfaat dari program.

#### **4. Perataan**

Perataan dalam pelaksanaan penyaluran Program BPNT di Desa Dayakan sebagai Penerima manfaat dari program Bantuan Pangan Non Tunai, yang disebut KPM. Sesuai dengan pedoman dan aturan pelaksanaan bantuan sasaran bantuan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi 25 % terendah di daerah pelaksanaan. Dari hasil temuan di lapangan, BPNT di Desa Dayakan masih memberikan bantuan bagi orang yang berkecukupan. Ketidaktepatan sasaran bantuan disampaikan langsung oleh Koordinator Pendamping sosial PKH kecamatan Badegan yaitu Bapak Zainal Arifin, yang mengatakan bahwa: “Sebagian penerima BPNT sudah tepat tapi memang ada beberapa KPM yang sejahtera namun masih menerima bantuan itu.

#### **5. Responsitas**

Adanya program bantuan pangan non tunai diharapkan mampu mengurangi pengeluaran KPM karena dengan mekanisme elektronik warung yang dimana KPM hanya dapat mencairkan bantuan dengan menukarkan barang sesuai kebutuhan di e-warung. Itu tentu saja efektif dalam mengurangi beban kebutuhan KPM belum lagi bantuan tersebut hanya dapat ditukarkan dalam waktu satu kali sebulan.

Dijelaskan Bapak Putut sebagai pendamping Sosial PKH Desa Dayakan, yaitu Bantuan pangan non

tunai sudah sangat baik terutama dalam mengurangi beban KPM itu terbukti karena kebutuhan KPM sudah diatur dalam BPNT sehingga KPM dituntut mampu mengatur pemenuhan kebutuhan dengan baik sehingga bantuan itu dapat cukup dalam sebulan”

Kebijakan sosial merupakan salah satu kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (developmental). Sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya. Secara garis besar kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial dan sistem perpajakan. Berdasarkan kategori ini maka dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan, hukum atau peraturan yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial. Namun tidak semua kebijakan sosial berbentuk perundang-undangan.

## **6. Ketepatan**

Mekanisme penyaluran dana bantuan pangan dijalankan oleh instrumen penyalur. Bank Penyalur adalah salah satu instrumen penyalur dengan melakukan pemindahbukuan dana bantuan sosial ke rekening Kementerian

Sosial di Bank Penyalur ke rekening KPM. Proses pemindahbukuan tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setiap bulannya sejak dana ditransfer dari Kas Negara/Kas Daerah ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur.

Penyaluran dana BPNT ke rekening KPM dijadwalkan setiap tanggal 25 perbulannya. Penjadwalan tersebut atas pedoman umum bantuan pangan non tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah pelaksana. Akan tetapi, penyaluran bantuan tidak konsisten pada jadwal yang telah ditentukan sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas pelaksanaan bantuan. Ketidakkonsistenan jadwal penyaluran di benarkan oleh Ibu Katirah, Ibu Suliyem, Ibu Kadinem, dan Ibu Lia Puspitasari (Pengelola e-warung dan masyarakat KPMBPNT Desa Dayakan).

Bapak Ginanto sebagai Kasi Kesmas Desa Dayakan, menjelaskan Ibu Katirah warga masyarakat KPMBPNT Desa Dayakan, mengatakan: “Biasanya penyaluran lewat dari jadwal”, Ibu Suliyem warga masyarakat KPMBPNT Desa Dayakan, mengatakan “bantuan pangan biasa tidak tepat waktu”, Ibu Kadinem warga masyarakat KPMBPNT Desa Dayakan, mengatakan “pada saat waktu penyaluran yang terkadang berubah dan bantuan sebelumnya sudah habis” dan Ibu Lia Puspitasari (sebagai Pengelola e-warung dan Masyarakat KPMBPNT Desa Dayakan), mengatakan bahwa: ”pelaksanaannya sudah bagus

namun terkadang tidak sesuai dengan jadwal saat penyaluran”.

## **Kesimpulan Dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

Evaluasi pelaksanaan BPNT di Desa Dayakan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo berdasarkan teori William Dunn adalah efektivitas pencapaian tujuan BPNT, efisiensi waktu penyaluran dan jumlah e-warong atau agen Bank BNI 46 yang memfasilitasi pembelian barang, kriteria perataan penerima program BPNT, dan kriteria responsivitas penanganan cukup baik. Sedangkan kriteria kecukupan hasil/manfaat BPNT yang dirasakan oleh masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kriteria ketepatan BPNT dalam menjawab masalah kemiskinan dan kelaparan yang dihadapi masyarakat miskin sudah cukup baik.

Di Desa Dayakan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, tujuan mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan kebutuhan pangan dan tujuan memberikan lebih banyak pilihan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan masih kurang maksimal. Sedangkan tujuan memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, tujuan meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan, serta tujuan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) cukup baik

### **B. Saran**

1. Perlu adanya pemutakhiran basis data terpadu yang digunakan sebagai dasar untuk

menetapkan KPM BPNT dengan cara melakukan pendataan masyarakat miskin di Desa Dayakan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo yang belum mendapatkan program BPNT sehingga memunculkan data penerima yang valid, tepat dan akurat untuk mendukung pengoptimalan perataan masyarakat penerima BPNT.

2. Untuk mendukung pelaksanaan BPNT perlu adanya pengoptimalan sarana penunjang pelaksanaan pembelian barang seperti jaringan GPRS yang memadai untuk penggunaan EDC di e-warong atau Bank BNI 46 Desa Dayakan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.
3. Perlu adanya peningkatan jumlah dan sebaran e-warong guna memfasilitasi pembelian bahan pangan BPNT di Desa Dayakan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo yang memiliki jumlah KPM tertinggi, sehingga memudahkan KPM dalam melakukan pembelian barang.
4. Koordinasi dan penilaian pelaksanaan BPNT tidak hanya dilakukan di tingkat pemerintah daerah yaitu Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo dan Bank BNI 46 selaku Kantor Sosial melainkan dilakukan juga bersama dengan Kementerian Sosial untuk mengatasi masalah gagal buka rekening kolektif dan masalah saldo nol yang masih tinggi khususnya di Desa



Dayakan Kecamatan Badegan  
Kabupaten Ponorogo

5. Memberikan upaya edukasi dan pengembangan diri untuk peningkatan kualitas masyarakat miskin agar menghasilkan masyarakat yang lebih mandiri seperti pengadaan kegiatan pelatihan keterampilan ataupun kegiatan penyuluhan bagi masyarakat KPM BPNT murni di Desa Dayakan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sehingga tidak terbatas hanya KPM BPNT PKH saja.
6. Pendamping sosial mengawasi dan melaporkan pelaksanaan secara rutin setiap bulannya terkait permasalahan yang dialami oleh KPM BPNT kepada koordinator kota program BPNT di Desa Dayakan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dan Bank BNI 46 untuk meningkatkan responsivitas terhadap masalah penyaluran dan pembelian barang dengan mengupayakan solusi penyelesaian masalah yang cepat dan tepat.

#### Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur
- Abidin, Y. 2016. *Revitalisasi evaluasi pembelajaran*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dye, Thomas R. 1987. *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall

Madani, Muhlis. 2011. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. ed.rev. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhlis. 2011. *Dimensi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Nugroho, R., 2017. *Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Rian. 2017. *Public Policy*. Jakarta: PT Gramedia

Rusli, Budiman. 2015. *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: CV. Adoya Mitra Sejahtera

Siwah. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika Madani,

Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Adminitrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Bandung: Graha Ilmu

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sulistio, Eko Budi. 2013. *Kebijakan Publik*, Bandar Lampung: Fisip Universitas Lampung Tresiana,

- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Wayne Parsons. 2016. *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wayne. 2014. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- William N Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Winarno, Budi, 2014. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Jurnal dan Dokumen:**
- Arief, Ibnu Sazmie. 2017. Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Di Kelurahan Maharatu Kota Pekanbaru. JOM FISIP Vol. 4 No. 2- Oktober 2017. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
- Bagus, Danar Andito dkk. 2016. Evaluasi Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. Universitas Diponegoro
- Huzaipa. 2014. Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. E-Jurnal Katalogis, Volume 2 Nomor 7, Juli 2014 hlm 158-169. Pascasarjana Universitas Tadulako Palu
- Ishartono dan Raharjo, Santoso Tri. 2016. Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan. Social Work Jurnal Vol 6 No 2 Halaman 154-272
- Meutia, Intan Fitri, dkk. 2013. Evaluasi Kebijakan Responsif Gender Bidang Pendidikan di Provinsi Lampung. Prosiding Seminar Hasil Penelitian FISIP Unila. <http://scholar.google.co.id/>
- Rachman, Benny dkk. 2018. Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program beras sejahtera dan bantuan pangan non-tunai (BPNT). Vol. 16 No. 1, Juni 2018: 1-18 DOI: <http://dx.doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.1-18>
- Widyastuti, K dkk. 2017. Tantangan dan Hambatan Implementasi Uang Elektronik di Indonesia. Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information Systems). 1/13 (2017), 38-48
- DOI: <http://dx.doi.org/10.21609/jsi.v13i1.465> Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia
- Yogasulistyo, Handika. 2017. Efektivitas E-Warong Kube Jasa PKH Sejahtera Wirobrajan dalam Mengoptimalkan Penerimaan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Di Kota Yogyakarta Tahun 2017. Fisip UMY, 2017-12-18.

[Http://Repository.umy.ac.id](http://Repository.umy.ac.id)  
diakses 7 September 2018

Panduan Umum BPNT 2019:  
Direktorat Jenderal Penanganan  
Fakir Miskin Kementerian Sosial  
RI

Panduan Umum Bantuan Pangan  
Nontunai 2018: Tim Pengendali  
Pelaksanaan Penyaluran Bantuan  
Sosial Secara Nontunai

Peraturan Desa Dayakan Nomor 02  
Tahun 2019 Tentang Susunan  
Organisasi Dan Tata Kerja  
Pemerintah Desa

**Website:**

<https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/01/30/754/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-tahun-2012---2018.html> diakses pada 25 Juli 2020).

<https://Jawa.Timur.bps.go.id/> diakses 20 Agustus 2020.

[https://www.kemsos.go.id/berita/rapat-koordinasi-dan-sosialisasi-program-bantuan-pangan-non-tunai-di-provinsi-Jawa Timur](https://www.kemsos.go.id/berita/rapat-koordinasi-dan-sosialisasi-program-bantuan-pangan-non-tunai-di-provinsi-Jawa-Timur) diakses pada 29 Juli 2020)